

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UII Press. Jakarta. 2009.
- Al-Rashid, Harun, *Sekilas Tentang Jual-Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumber Bandung, 1979.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah (Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2008.
- , *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi 2004.
- , *Hukum Agraria Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria, Liberty*, Yogyakarta, 1997.
- Mustafa, Bachsan, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remaja Karya CV, Bandung, 1984.
- Parlindungan, AP, *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*, Alumni, Bandung, 1973.
- Pasribu, Chairiumam, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Prakoso, Djoko, Dkk, *Eksistensi Prona sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Per data Barat (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta. 1993
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rubaie, Achmad, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Ruchiyat, Eddy, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUAP*, Bandung, Armico, 1989.
- Salindeho, John, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Sunadara, Ketut, *penuangan baru prinsip tunai dan terang dalam jual beli tanah menurut hukum agraria nasional*, KERTA Partika, No 47 tahun XV juni 1989.
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia* (dalam parspektif islam, adat, BW), PT. Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Soekanto, Soejono, dkk, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1884.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1991.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1978.
- T, Haryanto, *Cara Mendapatkan Hak Milik Atas Tanah*, Usaha Nasional, 1981.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku kesatu, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, jakarta, 2000.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet II, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Wignjodipuro, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, MCML XXXII, 1982.

-----, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1992.

### **B. Artikel, Jurnal dan Penelitian Hukum.**

BPHN I, *Seminar Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1976.

Sumardjono, Maria S. W, *Aspek Teoretis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Majalah Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjadarda, No. 18/X/93, Yogyakarta, 1993.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 204).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertnahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Surat Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 44/Pdt.G/2010/PNBwi.

Surat Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 238/PDT/2011/PT.Sby.

Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor : 377 K/Pdt/2012.